

## ANALISA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG DALAM RANGKA MEMINIMALISASI PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PT TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA

**Hayuningtyas Pramesti Dewi\***

**Abstract:** *The purpose of this study is to determine how much is Internal Control consist of the control environment, risk assesment, control activities, information and communication and monitoring influence to effort of reducing uncollectible accounts at PT. Tucan Pumpco Services Indonesia. Sources of data used in this study is primary data, which are collected by quetionary and straight interviu. This data analyzed by comparing Standart Operating Procedures and result of questionare and interviu in qualitative description. The result of this study showed that the component of Internal Control in PT Tucan Pumpco Services Indonesia are not quite effective to reduce uncollectible account, specially in component monitoring, so company must effort their monitoring activities in way to reducing uncollectible accounts, and so they should have wiser accounting policies for uncollectible accounts.*

**Keywords:** *Internal Control, Control Environment, Control Activities, Information and Communication, Monitoring, Uncollectible Accounts.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam suatu kegiatan usaha, baik itu perusahaan besar maupun kecil tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usahanya. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, dengan pelaksanaan tujuan perusahaan serta konsistensi dalam melakukan setiap aktivitasnya, maka bukan tidak mungkin keuntungan yang besar akan diraih oleh perusahaan. Tapi dibalik setiap kegiatan usaha, tentunya banyak masalah dan kendala yang akan dihadapi sebagai tantangan untuk para pelaku usaha di bidang apapun. Kendala dan masalah yang dihadapi biasanya datang dari bagian-bagian yang cenderung berisiko besar untuk menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan mengurangi keuntungan.

Manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola

perusahaan harus mempunyai perencanaan yang baik dan standar pelaksanaan yang dapat diterapkan sebagai hasil evaluasi agar dapat melihat sejauh mana tujuan perusahaan telah tercapai. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka semakin kompleks kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan, sehingga tugas dan wewenang pimpinan di delegasikan kepada orang lain. Dengan demikian, pimpinan perusahaan butuh seseorang yang kompeten untuk menganalisa dan membuat laporan-laporan kegiatan operasional yang terjadi di perusahaan tersebut, agar pimpinan perusahaan tidak luput dari aktivitas pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Kebutuhan akan laporan ini dapat dipenuhi dengan adanya sistem yang memadai dalam setiap pengendaliannya.

Piutang merupakan klaim uang pada perusahaan maupun individu, klaim tersebut biasanya didapatkan dari

penjualan barang dan jasa maupun peminjaman uang. Piutang merupakan elemen aset penting dalam setiap laporan keuangan perusahaan, sehingga prosedur yang wajar dan pengamanan yang cukup terhadap aset ini sangat penting, bukan saja untuk perusahaan, tapi untuk memelihara hubungan dengan para pelanggan, karena total piutang perusahaan sebagian besar diandalkan dari piutang para pelanggan. Tetapi, konsekuensi logis dari piutang usaha ini adalah timbulnya piutang yang tidak tertagih, yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Dari sekian banyak debitur perusahaan, mungkin ada diantaranya yang tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada perusahaan, misalnya debitur yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Piutang kepada debitur bermasalah demikian ini yang kemudian dinyatakan sebagai piutang tak tertagih (*uncollectible account*).

Pengendalian intern merupakan suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan atau dewan direksi dan manajemen secara keseluruhan dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu; keefektifan dan efisiensi operasional perusahaan, pelaporan keuangan yang handal, dan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan. Jika masih terjadi kesalahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian piutang di perusahaan itu, sehingga masih timbul masalah piutang tak tertagih, maka ada baiknya dilakukan analisis manfaat sistem pengendalian piutang tersebut, agar masalah yang sama tidak timbul di kemudian hari. Ditinjau dari cara pendekatan manajemen preventif, maka ada tiga bidang pengendalian yang umum pada titik mana dapat diambil tindakan untuk mewujudkan pengendalian piutang. Ketiga bidang tersebut antara lain pemberian piutang dagang, penagihan (*collection*), dan penetapan dan

penyelenggaraan pengendalian internal yang layak.

Dengan demikian permasalahan yang diteliti adalah apakah Sistem Pengendalian Interen Piutang yang telah dilaksanakan perusahaan sudah berjalan dengan efektif dan bagaimana kebijakan akuntansi perusahaan dalam meminimalisir kemungkinan Piutang Tak Tertagih. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Interen Piutang perusahaan telah berjalan efektif dan bagaimana kebijakan akuntansi perusahaan dalam upaya meminimalisasi Piutang tak tertagih. usaha membantu pelaksanaan prosedur penjualan kredit yang telah ditetapkan perusahaan.

## TINJAUAN LITERATUR

**Pengendalian Interen** menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) (2007:256) adalah “Rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Pengendalian internal berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Pengendalian bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam proses manajemen tersebut, akan tetapi merupakan bagian integral dalam proses tersebut.”

Herry (2012:45) mendefinisikan “Sebuah sistem pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarnya.”

Azhar Susanto (2008:88) mengemukakan bahwa “Pengendalian intern adalah semua metode, kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi, dan kelayakan data manajemen serta standar operasi manajemen lainnya.”

Tujuan Pengendalian Interen menurut Zaki (2007:89) adalah Menjaga

keamanan harta milik perusahaan, Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, Memajukan efisiensi operasi perusahaan, dan Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi.

Komponen Pengendalian Interen menurut AICPA dalam SAS (*Statement on Auditing Standards*) No. 78 (2007) yang terdapat dalam Standar Profesi Akuntan Publik menyatakan bahwa komponen pengendalian intern terdiri dari: 1) Lingkungan pengendalian, yang merupakan hal mendasar dalam komponen pengendalian intern. 2) Penilaian risiko, berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. 3) Aktivitas pengendalian, adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani berbagai resiko yang telah diidentifikasi perusahaan. Sedangkan aktivitas pengendalian dapat dikategorikan dalam beberapa aktivitas, diantaranya adalah otorisasi transaksi, pemisahan tugas, catatan akuntansi, pengendalian akses, verifikasi independen. 4) Informasi dan Komunikasi yaitu menyangkut penyampaian informasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaporan keuangan agar mereka memahami bagaimana aktivitasnya berhubungan dengan pekerjaan orang lain, baik di dalam organisasi maupun diluar organisasi. 5) Pengawasan, adalah proses penilaian kualitas kerja struktur pengendalian intern secara periodik dan terus menerus. Tujuannya adalah menentukan apakah pengawasan intern telah beroperasi sebagaimana yang telah diperbaiki sesuai dengan perubahan keadaan.

Pengertian Piutang menurut Elvy Maria Manurung (2011:67) adalah “Jumlah tagihan dari perusahaan terhadap pelanggan berdasarkan penjualan kredit yang telah dilakukan sebelumnya”.

Jenis-jenis Piutang menurut Slamet Sugiri (2009:43) yaitu 1) Piutang Dagang

adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka, dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai instrument kredit. Piutang dagang berasal dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit dalam operasi usaha normal. 2) Piutang wesel adalah klaim yang dibuktikan dengan instrument kredit secara formal. Instrument kredit ini mensyaratkan debitur untuk membayar dimasa yang akan datang pada tanggal yang sudah ditentukan misalnya minimal 60 hari setelah tanggal penandatanganan wesel. Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitur (yang berutang) kepada pihak kreditor (yang memberi utang) untuk membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan dimasa yang akan datang. Jangka waktu piutang wesel pada umumnya paling sedikit 60 hari. 3) Piutang lain-lain meliputi piutang non usaha seperti pinjaman kepada pejabat perusahaan, pinjaman kepada karyawan maupun pinjaman kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan usaha. Piutang lain-lain

Syarat Pembayaran Piutang. Dalam faktur yang dibuat harus dicantumkan adanya syarat pembayaran yang digunakan. Pentingnya syarat pembayaran ini agar dapat ditetapkan secara andal, apakah terhadap pembayaran piutang tersebut debitur mendapatkan potongan atau tidak, dan kapan batas akhir jatuh tempo faktur tersebut. Dengan begitu pada setiap akhir periode akuntansi dapat dilakukan analisis umur piutang terhadap saldo piutang yang ada.

Syarat pembayaran adakalanya mempunyai satu bagian saja, yaitu yang menyatakan batas akhir atau jatuh tempo faktur, dan ada yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama tentang syarat mendapatkan potongan tunai dan bagian kedua tentang batas akhir atau jatuh tempo faktur.

Menurut Ahmad Syafi'i Syakur (2009:96), ada beberapa jenis syarat pembayaran yang dapat digunakan, antara

lain 1) n/60, artinya debitur sudah harus membayar harga faktur tersebut paling lambat 60 hari setelah tanggal dibuatnya faktur. 2) 2/10.n/60, artinya debitur akan mendapat potongan tunai sebesar 2% bila harga faktur dibayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal faktur dibuat, dan debitur sudah harus membayar harga faktur tersebut paling lambat 60 hari setelah tanggal dibuatnya faktur. 3) n/EOM atau n/AB, artinya debitur sudah harus membayar harga faktur tersebut paling lambat pada akhir bulan dibuatnya faktur tersebut. 4) 2/EOM.n/60, artinya debitur akan mendapatkan potongan 2% bila harga faktur dibayar sampai akhir bulan dibuatnya faktur, dan debitur sudah harus membayar harga faktur tersebut paling lambat 60 hari setelah tanggal dibuatnya faktur. 5) n/10 prox, yaitu batas akhir pembayaran faktur tersebut adalah 10 hari setelah berakhirnya bulan dibuatnya faktur tersebut. 6) 2/10/prox. n/60, yaitu debitur akan mendapatkan potongan 2% bila faktur dibayar sampai 10 hari setelah berakhirnya bulan dibuatnya faktur tersebut, dan debitur sudah harus membayar harga faktur tersebut paling lambat 60 hari setelah tanggal dibuatnya faktur.

Piutang Tak Tertagih (*uncollectible account*) merupakan Piutang debitur bermasalah yang tidak dapat melunasi utang-utangnya. Ahmad Syafi'i Syukur (2009:96) berpendapat bahwa ada dua metode yang dapat digunakan untuk penghapusan piutang, yaitu 1) Metode penghapusan langsung (*direct write off method*), metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang relatif baru berdiri, yang belum mempunyai data-data historis tentang piutang-piutangnya, atau perusahaan yang sebagian kecil saja dari penjualannya yang dilakukan secara kredit. 2) Metode penghapusan tidak langsung (*undirect write off method*)/ metode Cadangan, metode ini lebih sesuai digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau yang sebagian penjualannya dilakukan secara kredit, yang mempunyai

data-data historis tentang piutangnya. Pemakaian metode ini mengharuskan dilakukannya estimasi pada setiap akhir periode akuntansi terhadap kemungkinan piutang-piutang yang tidak dapat ditagih dalam periode akuntansi yang akan datang.

## METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang menangani proses penjualan & penagihan piutang PT Tucan Pumpco Services Indonesia dan sampelnya adalah 15 karyawan yaitu 5 karyawan yang meliputi *controller*, direktur, serta manajer yang akan menjadi narasumber dari wawancara yang akan dilakukan di PT Tucan Pumpco Services Indonesia, serta 10 karyawan bagian *accounting* dan marketing pada PT Tucan Pumpco Services Indonesia menjadi responden atas kuesioner yang diberikan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan membandingkan antara SOP yang berlaku di perusahaan dengan hasil dari kuesioner yang dijawab oleh responden dan menganalisis penerapan sistem pengendalian piutang dalam meminimalisasi piutang tak tertagih pada perusahaan.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

Untuk menunjang analisa dan pembahasan, berikut akan dijabarkan terlebih dahulu kebijakan perusahaan dalam menangani kontrak kerja yang berkaitan dengan piutang.

Bagian yang terkait didalam proses penjualan kredit adalah: 1) *Controller* tugasnya adalah memverifikasi hasil penelitian bagian *marketing* mengenai karakteristik kantor klien dan *track record klien*, mempelajari pengajuan kerja dari klien dan memberi keputusan disetujui atau tidaknya proyek tersebut dijalankan. 2) *Marketing*. Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk menerima pengajuan dari klien (dalam hal ini pihak yang memiliki project) yang membutuhkan jasa *cementing*, atau *stimulation* dari PT

Tucan Pumpco Services Indonesia, mempelajari karakteristik klien, *track record* perusahaannya, dan mempelajari jasa-jasa apa saja yang dibutuhkan oleh klien dan mencocokkan spesifikasi jasa yang diminta oleh klien dengan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, menyeleksi klien dengan memperhatikan *track record*nya dan menyerahkan pengajuan ke controller. 3) *Accounting*. Bagian ini mengarsipkan *invoice-invoice* yang masuk ke perusahaan pada saat kontrak kerja sudah dimulai dan mencatat piutang yang timbul akibat dari belum dibayarnya kontrak kerja pada saat itu.

Adapun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berkaitan dengan Piutang adalah 1) Staf bagian marketing menerima pengajuan dari klien (dalam hal ini yang mempunyai project) yang membutuhkan jasa PT Tucan Pumpco Services Indonesia. 2) Staf bagian marketing melakukan analisa atas pengajuan dari klien. 3) Staf bagian marketing melakukan analisa berupa latar belakang klien, *track record* perusahaannya, dan jasa-jasa apa yang dibutuhkan oleh klien. 4) Hasil analisa yang dilakukan oleh bagian marketing diberikan kepada *controller*. 5) *Controller* kemudian memverifikasi analisa dan pengajuan dari bagian *marketing* mengenai karakteristik kantor klien, *track record klien*, serta pengajuan dari klien. 6) *Controller* menganalisa jasa yang

dibutuhkan oleh klien. 7) *Controller* membuat Berita Acara Pekerjaan (BAP) yang akan diberikan oleh *marketing* sehingga *marketing* bisa mengajukan kepada klien. 8) Apabila klien sepakat maka berdasarkan BAP tersebut, dibuatlah kontrak kerja. 9) Bagian *accounting* kemudian mencatat piutang yang timbul akibat jasa yang diberikan. 10) Bagian *accounting* juga mengarsipkan *invoice-invoice* yang timbul dari kontrak kerja itu. 11) Sisa pembayaran kontrak kerja dibayarkan sesuai dengan masa berlakunya kontrak kerja tersebut. 12) Apabila setelah jatuh tempo pembayaran piutang berakhir, piutang tidak kunjung dibayarkan, maka *Controller* akan memberikan surat peringatan perihal pembayaran piutang tersebut. 13) Jika setelah tiga kali diberi surat peringatan, piutang tidak kunjung dibayar, maka *Controller* akan meneruskan kasus ini ke jalur hukum, untuk mengetahui apa alasan dibalik tidak dibayarnya piutang tersebut. Setelah jalur hukum ditempuh, apabila diketahui ternyata perusahaan tersebut pailit/bangkrut sehingga tidak bisa membayar piutang, maka piutang tersebut akhirnya menjadi piutang tidak tertagih dan bagian *accounting* menggunakan metode penghapusan langsung (*direct write off method*) untuk menghilangkan piutang tak tertagih itu.

### 1. Analisa perbandingan antara SOP yang berlaku diperusahaan dengan hasil dari kuesioner yang dijawab oleh responden untuk Lingkungan Pengendalian.

**Tabel I**  
**Hasil kuesioner atas lingkungan pengendalian**

NO	PERNYATAAN	TANGGAPAN	TOTAL JAWABAN	PRESENTASE
1	Apakah manajemen memiliki peraturan yang dapat mendorong personel untuk terlibat dalam perilaku ilegal dalam menangani piutang yang timbul akibat penanganan kontrak kerja.	YA	0	0
		TIDAK	15	100%
		TIDAK RELEVAN	0	0

JUMLAH			15	100%
2	Apakah manajemen memiliki standar dalam memilih dan menugaskan personil dalam menangani piutang yang timbul akibat kontrak kerja.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
3	Apakah manajemen turut diawasi dewan direksi dan komisaris dalam melakukan atau menjalankan prosedur dalam penanganan piutang yang timbul akibat kontrak kerja.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
4	Apakah manajemen memiliki prosedur dalam menentukan metode pembayaran piutang.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
5	Apakah manajemen memiliki struktur organisasi dan job description yang memadai.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
6	Apakah perusahaan melakukan pelatihan untuk para karyawan dalam menunjang aktivitas mereka di perusahaan.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%

Sumber: Diolah oleh penulis

Hasil kuesioner dari 15 (lima belas) responden, 100% menjawab bahwa Pengendalian Interen dari pengukuran Lingkungan Pengendalian telah berjalan sesuai dengan SOP. Hasil analisa juga menunjukkan perusahaan sudah memiliki lingkungan pengendalian yang baik, hal ini tercermin dengan manajemen tidak memiliki peraturan yang akan atau bertujuan untuk mendorong personel untuk terlibat didalam perilaku ilegal dalam penanganan piutang perusahaan, disisi lain perusahaan memiliki dan menentukan peraturan untuk menjaga aset perusahaan

agar personil didalam perusahaan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan. Selain itu juga diketahui bahwa manajemen memiliki standar dalam memilih dan menugaskan personil dalam penanganan piutang yang timbul akibat kontrak kerja, manajemen sudah memilih karyawan yang sudah berkompeten didalam hal penanganan kontrak kerja dengan tujuan memperkecil resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan berupa kesalahan atau tidak relevannya sebuah kontrak kerja. Perusahaan juga menerapkan prosedur penanganan piutang

dan manajemen yang bertanggung jawab dalam menjalankan prosedur tersebut diawasi pula oleh dewan direksi dan komisaris, namun pada prakteknya serta didalam *SOP* perusahaan, penanganan piutang oleh manajemen juga diawasi oleh *Controller*. untuk menangani adanya piutang yang timbul, manajemen juga sudah menentukan metode pembayaran piutang agar klien dapat melunasi piutang dan perusahaan memperoleh pendapatan yang maksimal. Perusahaan juga sudah memiliki struktur organisasi serta *Job Description* yang jelas dan sudah diatur sehingga semua personil dapat

menjalankan tugasnya sesuai jabatan dan wewenang dan tugas yang sudah diberikan dan ditentukan. Demi menunjang terjalannya peraturan didalam perusahaan oleh para personil, serta para personil perusahaan juga semakin ahli didalam pekerjaannya, perusahaan juga melakukan pelatihan didalam menunjang aktivitas mereka, pelatihan-pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian masing-masing personil agar kinerjanya didalam perusahaan semakin baik.

## 2. Analisa perbandingan antara SOP yang berlaku diperusahaan dengan hasil dari kuesioner yang dijawab oleh responden untuk Penilaian Resiko.

**Tabel II**  
**Hasil kuesioner atas penilaian risiko**

NO	PERNYATAAN	TANGGAPAN	TOTAL JAWABAN	PRESENTASE
1	Apakah manajemen mengidentifikasi adanya risiko piutang yang tidak tertagih di perusahaan akibat kontrak kerja yang belum terbayar.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
2	Apakah manajemen mengevaluasi kontrak kerja dan dokumen pendukung.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
3	Apakah controller menilai dana awal pada kontrak kerja yang dialokasikan oleh manajemen.	YA	14	93,3%
		TIDAK	1	6,67%
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
4	Apakah manajemen marketing memiliki hak dan wewenang terkait penyusunan kontrak kerja.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
5	Apakah manajemen menyajikan dan mengungkapkan hasil dari penyusunan kontrak kerja pada	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK	0	0

	controller.	RELEVAN		
JUMLAH			15	100%
6	Apakah terdapat faktor – faktor yang signifikan terhadap penagihan piutang	YA	14	93,3%
		TIDAK	1	6,67%
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
7	Apakah manajemen melakukan tindakan pengendalian atas risiko yang ada.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%

Sumber: Diolah oleh penulis

Hasil kuesioner dari 15 (lima belas) responden, 100% menjawab bahwa Pengendalian Intern dari pengukuran Penilaian Resiko telah berjalan sesuai dengan SOP. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa perusahaan sudah memiliki penilaian risiko yang baik, hal ini terlihat dari kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasi risiko–risiko atas piutang yang tidak tertagih di perusahaan akibat

kontrak kerja yang belum terbayar, dan dalam proses identifikasinya, manajemen telah melakukan tindakan–tindakan preventif untuk mengatasi piutang tak tertagih yang timbul akibat kontrak kerja.

### 3. Analisa perbandingan antara SOP yang berlaku diperusahaan dengan hasil dari kuesioner yang dijawab oleh responden untuk Aktivitas Pengendalian.

**Tabel III**  
**Hasil kuesioner atas Aktivitas Pengendalian**

NO	PERNYATAAN	TANGGAPAN	TOTAL JAWABAN	PRESENTASE
1	Apakah dilakukan pemisahan tugas demi mencegah kesalahan maupun kecurangan yang signifikan dengan memberikan setiap personil pekerjaan khusus sesuai dengan pekerjaannya masing – masing.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
2	Apakah setiap penanganan kontrak kerja yang menimbulkan piutang, diotorisasi dengan tepat.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
3	Apakah aktivitas pengendalian	YA	15	100%

	yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka penanganan piutang tak tertagih, ialah dengan mereview kontrak kerja yang sudah dibuat.	TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
4	Apakah ada dokumen dan pencatatan yang tepat dan memadai dalam kontrak kerja piutang.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
5	Apakah pengecekan secara independen dilakukan oleh controller di setiap pembuatan kontrak kerja.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%

Sumber: Diolah oleh Penulis

Hasil kuesioner dari 15 (lima belas) responden, 100% menjawab bahwa Pengendalian Interen dari pengukuran Aktivitas Pengendalian telah berjalan sesuai dengan SOP. Hasil analisa dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemisahan tugas demi mencegah kesalahan maupun kecurangan yang signifikan dengan memberikan setiap personil pekerjaan khusus sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam setiap aktivitasnya. Diketahui pula bahwa setiap penanganan kontrak kerja yang menimbulkan piutang, diotorisasi dengan tepat oleh manajemen, dengan mereview

kontrak kerja yang sudah dibuat, manajemen sudah melakukan aktivitas pengendalian yang tepat dalam menangani piutang tak tertagih di perusahaan. Penyimpanan dokumen dan pencatatan yang tepat dan memadai dalam kontrak kerja piutang juga sudah dilakukan agar tidak terjadi kelalaian dalam penyusunan kontrak kerja tersebut. Pengecekan secara independen juga sudah dilakukan controller dalam setiap penyusunan kontrak kerja. Karena berdasarkan *SOP* yang berlaku didalam perusahaan pengecekan secara independen memang dilakukan dan yang bertanggung jawab adalah *controller*.

#### 4. Analisa perbandingan antara SOP yang berlaku diperusahaan dengan hasil dari kuesioner yang dijawab oleh responden untuk Informasi dan Komunikasi.

**Tabel IV**  
**Hasil kuesioner atas Informasi dan Komunikasi**

NO	PERNYATAAN	TANGGAPAN	TOTAL JAWABAN	PRESENTASE
1	Apakah controller menyetujui kontrak kerja yang sudah dibuat oleh bagian marketing.	YA	14	93,3%
		TIDAK	1	6,67%
		TIDAK RELEVAN	0	0

JUMLAH			15	100%
2	Apakah controller memeriksa kelengkapan dokumen – dokumen pendukung kontrak kerja.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
3	Apakah controller memeriksa keakuratan nilai kontrak berdasarkan pengajuan yang ada.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
4	Apakah kontrak kerja yang belum dibayarkan diklasifikasikan dengan baik.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
5	Apakah waktu pembayaran sudah tepat sesuai dengan kontrak kerja.	YA	0	0
		TIDAK	15	100%
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
6	Apakah piutang telah diakui dalam periode pada saat terjadinya piutang.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
7	Apakah piutang telah dicatat dalam periode pada saat terjadinya piutang.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
8	Apakah piutang telah diposting dalam periode pada saat terjadinya piutang.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%

Sumber: Diolah oleh penulis

Hasil kuesioner dari 15 (lima belas) responden, sebagian besar menjawab bahwa Pengendalian Interen dari

pengukuran Informasi dan Komunikasi telah berjalan sesuai dengan SOP, sedangkan namun ada satu jawaban

responden yang menyatakan bahwa masih ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan SOP. Hasil analisa menunjukkan bahwa pada bagian informasi dan komunikasi, didapatkan hasil bahwa controller lah yang mengatur persetujuan mengenai kontrak kerja yang dibuat oleh marketing dan pada saat proses persetujuan itu, controller memeriksa kelengkapan dokumen–dokumen pendukung kontrak kerja yang telah diajukan. Diketahui juga menurut SOP yang berlaku serta dari hasil jawaban responden bahwa controller memeriksa keakuratan nilai kontrak berdasarkan

pengajuan yang ada, sehingga bisa ditentukan apakah controller setuju atau tidaknya mengenai kontrak kerja tersebut. Kontrak kerja yang sudah dibuat dan belum dibayar, kemudian diklasifikasikan sehingga bisa dilihat mana yang kemungkinan timbul piutang tak tertagih dan mana yang tidak. Dan diketahui ternyata banyak pembayaran yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui, piutang yang timbul juga telah diakui, dicatat, dan diposting dalam periode pada saat terjadinya piutang tersebut oleh bagian keuangan.

**5. Analisa perbandingan antara SOP yang berlaku diperusahaan dengan hasil dari kuesioner yang dijawab oleh responden untuk Pemantauan.**

**Tabel V**  
**Hasil kuesioner atas Pemantauan**

NO	PERNYATAAN	TANGGAPAN	TOTAL JAWABAN	PRESENTASE
1	Apakah marketing yang mengatur besar kecilnya biaya yang dibutuhkan dalam proses kontrak kerja yang diajukan.	YA	13	86,67%
		TIDAK	2	13,37%
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
2	Apakah controller hanya melakukan pengawasan di dalam pembuatan daftar biaya yang digunakan dalam proses pekerjaan yang akan diajukan dalam pembuatan kontrak kerja.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
3	Apakah pengendalian internal dimaksudkan sebagai pemantau kebijakan entitas terhadap penanganan kontrak kerja.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
4	Apakah controller melakukan pengawasan terhadap pembayaran kontrak kerja yang sudah dibayarkan.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%

Sumber: Diolah oleh penulis

Hasil kuesioner dari 15 (lima belas) responden, sebagian besar menjawab bahwa Pengendalian Interen dari pengukuran Pemantauan telah berjalan sesuai dengan SOP namun ada sebagian jawaban yang menyatakan bahwa pemantauan tidak sesuai dengan SOP. Pada proses pemantauan, didapatkan hasil bahwa marketinglah yang mengatur besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dalam proses kontrak kerja yang diajukan, meskipun ada sedikit orang yang tidak setuju, bisa diambil kesimpulan bahwa tidak semua kontrak kerja yang diajukan

yang biayanya diatur oleh marketing. Dan diketahui bahwa controller hanya melakukan pengawasan di dalam pembuatan daftar biaya yang digunakan dalam proses pekerjaan yang akan diajukan dalam pembuatan kontrak kerja. Pengendalian internal juga dimaksudkan sebagai pemantau kebijakan entitas terhadap penanganan kontrak kerja. Menurut SOP perusahaan, setiap kontrak kerja yang sudah dibayarkan, diawasi setiap aktivitasnya oleh controller itu sendiri secara independen.

#### 6. Analisa penerapan sistem pengendalian piutang dalam meminimalisasi piutang tak tertagih pada perusahaan

**Tabel VI**  
**Hasil kuesioner atas Piutang**

NO	PERNYATAAN	TANGGAPAN	TOTAL JAWABAN	PRESENTASE
1	Apakah piutang tak tertagih timbul karena kurangnya pengawasan terhadap penanganan kontrak kerja.	YA	13	86,67%
		TIDAK	2	13,37
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
2	Apakah piutang yang dianggap paling krusial ialah piutang yang timbul akibat pembayaran kerja yang belum selesai.	YA	11	73,37%
		TIDAK	4	26,63%
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
3	Apakah piutang yang timbul di perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
4	Apakah controller mengawasi pembayaran piutang selama kontrak kerja berlangsung.	YA	15	100%
		TIDAK	0	0
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
5	Apakah piutang yang tidak terbayar selama jangka waktu	YA	15	100%
		TIDAK	0	0

	yang ditentukan sesuai kontrak kerja, dianggap piutang tak tertagih.	TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
6	Apakah dalam kontrak kerja terdapat tanggal jatuh tempo pembayaran piutang.	YA	14	93,3%
		TIDAK	1	6,67%
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%
7	Apakah sebagian besar piutang dapat ditagih.	YA	0	0
		TIDAK	15	100%
		TIDAK RELEVAN	0	0
JUMLAH			15	100%

Sumber: Diolah oleh penulis

Hasil jawaban responden mengenai piutang, merupakan acuan utama apakah piutang tak tertagih timbul karena kurangnya pengawasan terhadap penanganan kontrak kerja dan didapatkan hasil sebagian responden setuju bahwa piutang itu timbul karena kurangnya pengawasan, walaupun masih ada yang menjawab tidak setuju. Dan di perusahaan itu, piutang yang dianggap paling krusial ialah piutang yang timbul akibat pembayaran kerja yang belum selesai walaupun masih ada piutang lain yang dianggap krusial sehingga piutang yang timbul di perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Diketahui pula Controller juga mengawasi pembayaran piutang selama kontrak kerja berlangsung, sehingga pembayaran piutang tersebut bisa tepat waktu sesuai dengan kontrak kerja. Piutang yang tidak terbayar selama jangka waktu yang ditentukan sesuai kontrak kerja, dianggap piutang tak tertagih dan tertera juga tanggal jatuh tempo pembayaran piutang itu.

Walaupun pada kenyataannya didapat sebagian besar piutang di perusahaan itu tidak dapat ditagih sesuai dengan waktunya. Di dalam SOP juga dijelaskan bahwa piutang yang tidak terbayar selama

jangka waktu kontrak kerja, dianggap piutang tak tertagih dan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang itu juga ditentukan di dalam kontrak kerja.

Pada proses analisis ini, peneliti juga menganalisis hasil observasi dan wawancara mengenai prosedur dan kebijakan atas pemberian kredit. Proses analisis ini menilai bagaimana proses berjalannya sistem pengendalian piutang apakah sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada di perusahaan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ke perusahaan dan wawancara peneliti dengan 3 orang karyawan yang meliputi *Controller*, Kepala bagian marketing, dan Kepala bagian accounting.

Hasil observasi yang dilakukan berdasarkan SOP guna mengetahui apakah SOP yang ditetapkan oleh perusahaan sudah berjalan efektif dan sudah ditaati oleh setiap personil didalam perusahaan.

Dari keseluruhan observasi dan wawancara yang sudah dilakukan, kesesuaian praktek kerja yang dilakukan oleh personil-personil perusahaan sudah sesuai dengan *job description* masing-masing bagian dan pada prakteknya keseluruhan personil mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang sudah ditentukan oleh

perusahaan berupa *standart operasional procedure* yang sudah dijalankan dengan memadai.

Dari kebijakan akuntansi perusahaan dalam meminimalisasi piutang tak tertagih, diketahui bahwa perusahaan menggunakan metode penghapusan piutang untuk menghapus piutang tak tertagih yang timbul di perusahaan. Penghapusan piutang di perusahaan dilakukan, setelah jatuh tempo waktu pembayaran piutang itu, piutang tidak dibayar, maka akan diberikan surat peringatan untuk segera melunasi piutangnya. Setelah tiga kali diberikan surat peringatan piutang tidak dilunasi, maka akan ditempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah pembayaran piutang tersebut. Jika terbukti perusahaan itu tidak melunasi piutangnya dikarenakan pailit atau bangkrut dan piutang itu tidak bisa dibayar, maka perusahaan menghapus piutang tak tertagih yang timbul dengan menggunakan metode penghapusan langsung.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sistem pengendalian piutang pada PT Tucan Pumpco Services Indonesia masih belum efektif di akhir kontrak kerja, yang mengakibatkan timbulnya piutang tak tertagih.

Metode penghapusan piutang tak tertagih perusahaan menerapkan metode langsung (*direct write off method*) dan piutang yang macet perusahaan akan memberikan surat peringatan kepada debitur yang piutang bermasalah (menungak). Apabila tiga kali telah diperingka, maka perusahaan akan menempuh lewat jalur hukum dengan melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan metode langsung.

Sedangkan Saran yang dapat diberikan untuk PT Tucan Pumpco Services Indonesia agar lebih meningkatkan kewaspadaan pada pembuatan kontrak kerja tersebut, khususnya pengawasan terhadap personil-personil yang terlibat di dalamnya.

Pengawasan sebaiknya dilakukan selama proses transaksi, dari awal sampai akhir sehingga dapat meminimalisasi resiko piutang tak tertagih dan untuk pencatatan penghapusan piutang yang tak tertagih sebaiknya perusahaan menerapkan metode cadangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Syafi'i Syakur, 2009. *Intermediate Accounting*, AV Publisher, Jakarta.

Akmal, 2009. *Pemeriksaan Manajemen Internal Audit* Edisi Kedua. Jakarta: PT Indeks Jakarta.

Al Haryono Jusup, 2005. *Teori Akuntansi*, Edisi Keenam Jilid Satu, STIEYKPN, Yogyakarta.

Arens, Alvin A. James L. Loebbecke, 2008. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Terjemahan oleh Amir Abadi Jusuf, Buku Dua, Edisi Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.

Aries S.M. Basalamah, 2008. *Auditing PDE Dengan Standar IAI*. Depok Timur. Penerbit Usaha Kami

Azhar Susanto, 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission, 2007. *Guidance on Monitoring Internal Control Systems*, COSO, New York.

Company Profile, PT Tucan Pumpco Services Indonesia, 2013.

Elder, J. Randal, Beasley, S. Mark, Arens, A. Alvin, Amir Abadi Jusuf, 2012. *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta: Salemba Empat.

- Elvy Maria Manurung, 2011. *Akuntansi Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Fees, Reeve, Warren, 2005. *Pengantar Akuntansi*, Edisi 21, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Herry, 2012. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Iqbal Hasan, 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kieso, Donald.E., Weygandt, Jerry.J., Warfield, Terry.D., 2008. *Akuntansi Intermediate* (Edisi Keduabelas) (Jilid 1). Jakarta: Erlangga.
- Pahala Nainggolan, 2006. *Cara Mudah Memahami Akuntansi*, Edisi Pertama. Penerbit: PPM, Jakarta.
- Stice, Earl K., James D. Skousen, K. Fred., 2009. *Akuntansi Intermediate*. Buku Satu Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat.